

ABSTRAK

Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, memberikan representasi bagi perwakilan masyarakat dalam pemerintahan daerah. Namun, keberadaan DPRD tingkat Kabupaten/Kota tidak ditemukan pada pemerintahan daerah di Jakarta dikarenakan kekhususannya sebagai ibu kota negara. Keberadaan DPRD ini digantikan dengan Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang hanya ada di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait peran Dewan Kota/Dewan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Kota/Dewan Kabupaten memiliki peran sebagai wadah timbal balik antara masyarakat dan pemerintahan tingkat Kota/Kabupaten di Jakarta. Pelaksanaan peran Dewan Kota/Dewan Kabupaten tersebut dinilai masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama ialah terkait kewenangan yang terbatas pada Dewan Kota/Dewan Kabupaten. Kedua terkait minimnya fasilitas penunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh Dewan Kota/Dewan Kabupaten. Ketiga terkait proses pemilihan anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang tidak berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Lembaga Daerah, Pemerintahan Daerah, Daerah Khusus Ibukota

ABSTRACT

The presence of the Regional People's Representative Council (DPRD), both at the Provincial and Regency/City levels, provides representation for community representatives in local government. However, the existence of the DPRD at the Regency/City level is not found in the local government in Jakarta due to its specificity as the capital city of the country. The existence of this DPRD was replaced with the Dewan Kota/Dewan Kabupaten which only exists in Jakarta. This study aims to determine the role of the Dewan Kota/Dewan Kabupaten in the local government in Jakarta. This study uses a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the Dewan Kota/Dewan Kabupaten has a role as a forum for reciprocity between the community and the local government in Jakarta. The implementation of the role of the Dewan Kota/Dewan Kabupaten is considered to be still not running effectively. This is caused by several factors, the first is related to the limited authority of the Dewan Kota/Dewan Kabupaten. The second is related to the lack of supporting facilities for the implementation of their duties and obligations. The third is related to the process of selecting members of the Dewan Kota/Dewan Kabupaten which did not run optimally.

Keywords: *Local Institutions, Local Governance, Special Capital Region*